

## **PENGARUH EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI BANGKA BELITUNG**

**Oleh: Royda**

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

e-mail: [roydafauzi@gmail.com](mailto:roydafauzi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel independen terdiri dari variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah serta variabel belanja modal sebagai variabel dependen. Periode analisis terdiri dari sepuluh tahun yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013 serta menggunakan data keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Model analisis penelitian menggunakan regresi berganda dengan model estimasi *ordinary least square*. Kemudian melakukan evaluasi model dengan ekonometrika dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 83,74 persen. Sedangkan secara parsial, masing-masing variabel mempunyai arah yang sesuai dengan teori.

**Kata kunci : Efisiensi Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal**

### **ABSTRACT**

*This study, entitled Efficiency and Regional Financial Independence Against Capital Expenditure In Bangka Belitung province. The research objective was to determine the effect the financial capability of the visible area and the efficiency of local financial independence to capital expenditures in the province of Bangka Belitung. The independent variables consist of variables and variable regional financial efficiency of local financial independence as well as capital expenditure variable as the dependent variable. The period of analysis is composed of ten years starting from 2004 to 2013 and using financial data in the area of Bangka Belitung Province. Data analysis method used is descriptive analysis. Model studies using multiple regression analysis with ordinary least squares estimation model. Then evaluate the econometric and statistical models. The results showed that the overall variable area and the financial efficiency of local financial*

*independence variable significant effect on capital expenditures by the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) shows that at 83.74 percent. While partially, each variable has a direction consistent with the theory.*

**Keywords:** *Efficiency of Regional Finance, Regional Financial Independence, \ Capital Expenditure*

## **PENDAHULUAN**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu bagian integral dari perekonomian nasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur (Wikipedia, Kepulauan Bangka Belitung). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Provinsi yang masih bisa dibilang baru berdiri, juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan adanya desentralisasi fiskal yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak lahirnya Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi, bagaimana waktu untuk persiapan penyesuaian diri bagi daerah baru tersebut sudah tercukupi sehingga pelaksanaan bisa berhasil.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan media pemerintah daerah untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih diperuntukkan pada kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal.

Belanja modal pemerintah daerah juga digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat secara langsung dapat menikmati adanya pembangunan daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah yang sudah dijalankan pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia dirasakan masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan pertumbuhan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesiapan

dari masing-masing daerah yang berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan ini merupakan motivasi pertama dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi keuangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang-barang inventaris milik daerah) dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Daerah).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Efisiensi Keuangan Daerah**

Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Efisien Keuangan Daerah dikur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin kecil nilai efisiensi maka akan semakin efisien suatu daerah. Hal ini menyiratkan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan tersebut dapat menilai suatu kinerja keuangan daerah (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% maka dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80%-90% adalah cukup efisien, 60%-80% adalah efisien, dan dibawah 60% adalah sangat efisien.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi nilai kemandirian keuangan daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar daerah terutama pemerintah pusat. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Halim, 2008:233).

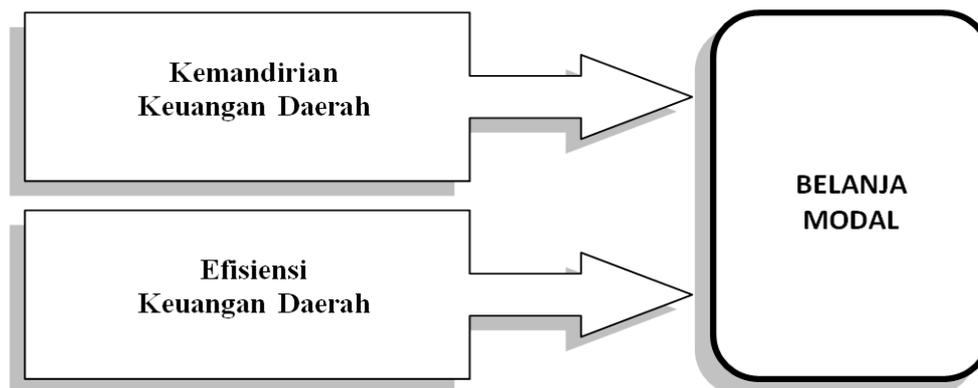
### **Belanja Modal**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Bastian, 2006: 45). Belanja daerah yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah adalah belanja modal atau belanja pembangunan. Belanja modal itu sendiri merupakan investasi pemerintah yang digunakan untuk pembentukan modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya (Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 53). Pemerintah daerah harus mampu mengelola dana yang ada untuk belanja modal demi meminimalisir kesenjangan antara tingkat pelayanan pemerintah dengan harapan oleh masyarakat. Apabila pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan publik yang optimal maka akan memberikan keuntungan di masa depan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

### **Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal**

Adanya desentralisasi fiskal mengharapkan setiap daerah untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi penciptaan penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah tersebut. Berikut kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang beserta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengamati dan meneliti tentang pengaruh kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Periode analisis terdiri dari sepuluh tahun yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013. Hal ini dikarenakan untuk melihat kesiapan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan adanya desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk *time series*, yang terdiri dari data keuangan daerah Kepulauan Bangka Belitung dengan rentang waktu tahun 2004 sampai dengan 2013. Data yang digunakan pada penelitian ini dipublikasikan oleh situs resmi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data yakni pengambilan data melalui dokumen tertulis baik berupa angka maupun keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

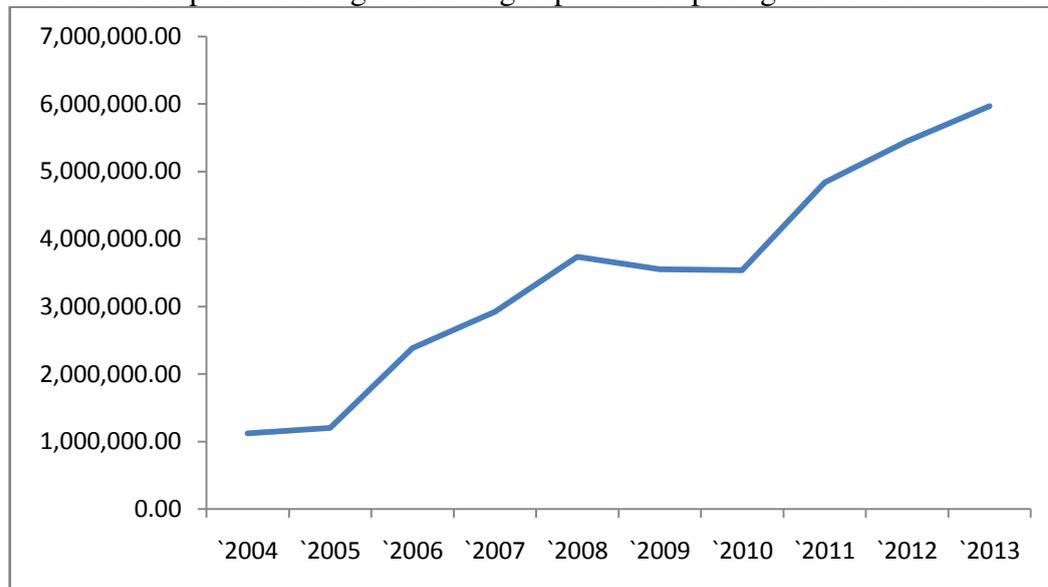
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Proses deskripsi data meliputi penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data. Kemudian hasil informasi ini disajikan secara lebih ringkas dan sederhana. Langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa spesifikasi model yang dibangun sudah tepat baik menurut uji asumsi klasik dan statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor keuangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir semua kegiatan pemerintahan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah. Semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan semakin banyak juga kemungkinan program atau kegiatan pemerintahan yang dapat dilaksanakan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, serta memanfaatkan penerimaan tersebut untuk membiayai program-program pembangunan daerah yang tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

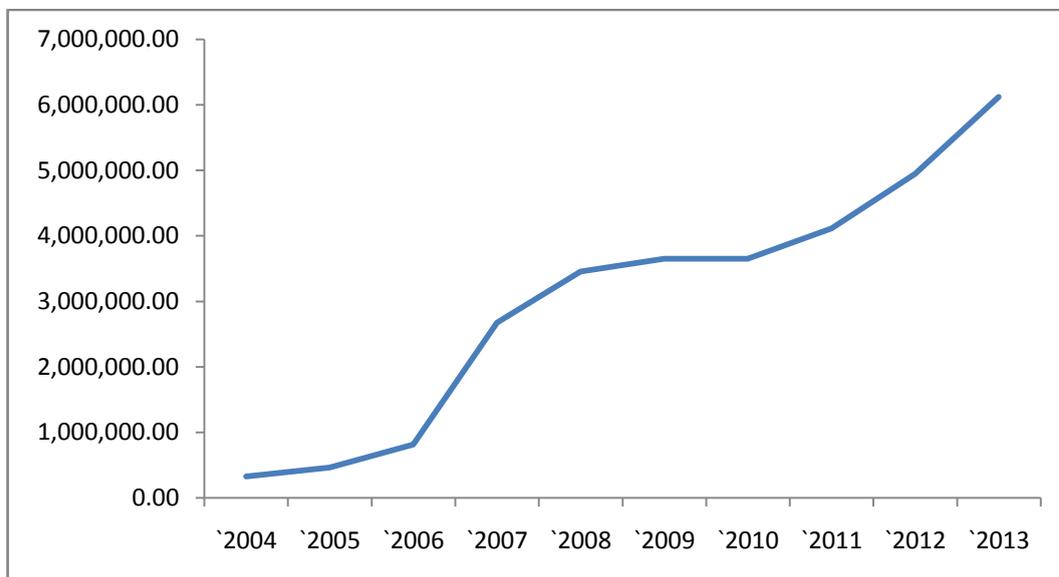
Kemampuan keuangan masing-masing daerah pada umumnya berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan beragam perbedaan baik dari sisi penerimaan daerah maupun belanja daerahnya. Secara umum total penerimaan daerah di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Adapun perkembangan penerimaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam triliun rupiah) Tahun 2004-2013**

Berdasarkan gambar di atas, terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya dan hanya di tahun 2009 dan 2010 yang pertumbuhan penerimaan sedikit menurun dikarenakan dampak yang terjadi pada krisis ekonomi di tahun 2008.

Realisasi pengeluaran daerah biasanya akan mengikuti besarnya jumlah realisasi penerimaan. Berikut gambar perkembangan pengeluaran daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**Gambar 2. Perkembangan Pengeluaran Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam triliun rupiah) Tahun 2004-2013**

Dengan pertimbangan bahwa jumlah *time series* sebanyak sepuluh tahun, maka model analisis data yang akan digunakan adalah *ordinary least square*. Berikut tabel hasil regresi dari model penelitian.

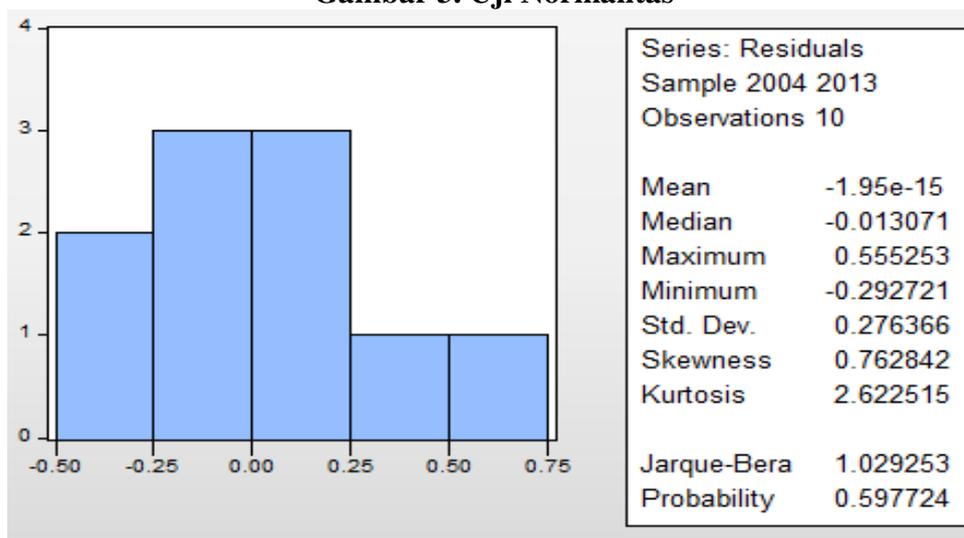
**Tabel 1. Hasil Regresi Model Penelitian**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-1.303999	0.539456	-2.417248	0.0463
X2	0.889863	0.311145	2.859959	0.0243
C	13.54156	2.612925	5.182529	0.0013
R-squared	0.837401	Mean dependent var		13.76000
Adjusted R-squared	0.790944	S.D. dependent var		0.685371
S.E. of regression	0.313370	Akaike info criterion		0.760460
Sum squared resid	0.687405	Schwarz criterion		0.851235
Log likelihood	-0.802300	Hannan-Quinn criter.		0.660879
F-statistic	18.02531	Durbin-Watson stat		1.383775
Prob(F-statistic)	0.001733	Wald F-statistic		35.45721
Prob(Wald F-statistic)	0.000217			

Sumber : Diolah dari Eviews

Sebelum melakukan estimasi, maka dalam penelitian ini juga dilakukan beberapa uji asumsi klasik. Pada hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa hasil regresi terbebas dari masalah normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan Autokorelasi.

**Gambar 3. Uji Normalitas**



Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis *Chi square*. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual telah memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dan nilai *Chi square* tabel. Uji JB didapat dari histogram normality dengan hipotesis yang digunakan  $H_0 =$  data terdistribusi normal.

Nilai JB sebesar 1,029253 sedangkan nilai *chi square* tabel yang dilihat dari jumlah variabel independen  $k=2$  dan  $\alpha=5\%$  yakni sebesar 15.50731. Nilai JB lebih kecil daripada nilai *chi square* tabel sehingga  $H_0$  diterima dan disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Permasalahan heterokedastisitas terjadi jika varian tidak konstan (heterokedastisitas) dan terjadi hubungan yang kuat antar residual. Masalah heteroskedastisitas sering dialami oleh data yang bersifat *cross section*. Berdasarkan hasil OLS, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.837401. Nilai *Chi square* hitung sebesar 8,37401 yang diperoleh dari jumlah observasi dikali dengan nilai  $R^2$ . Sedangkan nilai kritis *Chi squared* pada  $\alpha=5\%$ , dalah 15.50731. Oleh karena nilai *Chi squared* hitung lebih kecil dari pada nilai kritis *Chi squared*, maka  $H_0$  ditolak sehingga tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada penelitian.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antarvariabel independennya. Multikolinearitas dapat dideteksi dari adanya nilai  $R^2$  tinggi (lebih dari 0,90), tetapi sedikit t-statistik yang signifikan serta nilai F-statistik yang signifikan

namun t-statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian.

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

Correlation			
	Y	X1	X2
Y	1.000000	-0.768680	0.880627
X1	-0.768680	1.000000	-0.660842
X2	0.880627	-0.660842	1.000000

Sumber : Diolah dari Eviews

Uji Autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model ini akan digunakan uji *Durbin-Watson* (DW-Test). Jika nilai DW-Test lebih besar dari batas atas ( $dU$ ), maka tidak terjadi autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan statistik  $d$  dari Durbin-Watson (*DW test*) dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah  $dL$  (angka yang diperoleh dari table DW batas bawah),  $dU$  (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas),  $4 - dL$  dan  $4 - dU$ . Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-). Dari tabel hasil dari regresi dengan *OLS*, didapat nilai DW sebesar 1,383775 sedangkan  $dL = 0,6972$  dan  $dU = 1,6413$ . Setelah dihitung dari kelima kriteria pengujian Durbin Watson, maka dapat disimpulkan bahwa data terletak pada pengujian yang kedua yaitu  $dL \leq DW \leq dU$  merupakan daerah tidak ada keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran autokorelasi pada penelitian.

### Pengujian Statistik

Sedangkan pengujian statistik dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya ( $R^2$ ), koefisien regresi secara individual (uji t), dan pengujian koefisien secara serentak (uji F). Dari hasil analisis regresi penelitian dapat disimpulkan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai Dari hasil estimasi, besarnya  $R^2$  yang diperoleh adalah sebesar 0.837401. Artinya variabel Y (Belanja Modal) dalam model sebesar 83,74 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada di dalam model yaitu Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_2$ ). Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

### Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Nilai F hitung sebesar 18.02531 sedangkan nilai F tabel yang dilihat dari tabel F  $\alpha=5\%$  untuk  $n=50$  dan  $k=2$  (df pembilang =  $k-1$ , df penyebut =  $n - k$ ) adalah sebesar 5,31766. Oleh karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka  $H_0$

ditolak sehingga secara bersama-sama semua variabel bebas pada penelitian secara serentak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.

### Uji Signifikansi Individu (uji t)

Uji signifikansi individu bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai  $\alpha=5\%$ . Nilai t tabel yakni sebesar 1,85955. Berikut tabel uji signifikansi t ( $\alpha=5\%$ ) :

**Tabel 5. Uji Signifikansi t ( $\alpha=5\%$ ) Belanja Modal**

Analisis	t-statistik	t-tabel	Kesimpulan
X <sub>1</sub>	-2.417248	1,85955	Signifikan
X <sub>2</sub>	2.859959	1,85955	Signifikan

*Sumber : Diolah dari hasil regresi*

Dari model regresi di tabel 1, terlihat bahwa kedua variabel secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa efisiensi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat dari nilai probabilitas koefisien determinasi sehingga hipotesis penelitian diterima. Hal ini mencerminkan bahwa daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sanggup untuk menerima tugas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri sehingga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Efisiensi Keuangan Daerah pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun adanya pengaruh yang negatif mengindikasikan adanya penggunaan keuangan yang belum efisien. Penggunaan keuangan daerah yang tidak efisien pada daerah disebabkan realisasi pengeluaran yang lebih besar dari realisasi penerimaan sehingga terjadi pemborosan belanja daerah dan tidak dimaksimalkan untuk belanja modal. Padahal belanja modal sangat berperan terhadap pengembangan dan pembangunan daerah.

Nilai rasio kemandirian keuangan daerah relatif kecil apabila dilihat dari statistic, hal ini mencerminkan daerah belum terlalu mampu untuk membiayai pengeluaran daerah pada belanja modal. Kecilnya rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengindikasikan bahwa belum begitu siapnya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pengaruh efisiensi dan kemandirian keuangan daerah secara keseluruhan (simultan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan model estimasi *OLS* menunjukkan bahwa variabel independen pada periode penelitian yakni 2004-2013 mempengaruhi belanja modal secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 83,74 persen belanja modal dijelaskan oleh variabel yang ada pada penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

## SARAN

Dari hasil penelitian secara umum pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menunjukkan adanya peningkatan dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing yang terlihat dari peningkatan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah antarprovinsi. Akan tetapi, Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah serta memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. Kemampuan keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI, No.1, 2012, Hal. 1-19.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Prov.Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret (2011), Hal.46-58.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Percetakan Andi Offset. Yogyakarta.
- Susetyo, Didik. 2010. Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional. *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan pada FE UNSRI*, Palembang 25 Mei (2010).

- Todaro MP, Stephen CS. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.5, No.1, Oktober 2008 Hal.55-83.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.  
Realisasi APBD Tahun 2004-2012 dalam: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).